

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan



Gambar 4. 1 Logo Perusahaan

Sumber: PT Agrikencana Perkasa, 2025

PT Agrikencana Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur terpadu dengan kegiatan utama produksi pakan ternak, peternakan ayam petelur, dan pertanian berbasis probiotik. Perusahaan berlokasi di Kabupaten Klaten dan melayani kebutuhan peternak maupun petani di wilayah sekitar. Produk yang dihasilkan meliputi pakan ternak, telur konsumsi, kompos organik (*zero west system*), serta produk probiotik berupa growbag dan growmi. PT Agrikencana Perkasa menerapkan konsep usaha terintegrasi yang menghubungkan sektor peternakan, pertanian, dan pengelolaan limbah. Integrasi tersebut memungkinkan perusahaan mengendalikan kualitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Selain menghasilkan produk utama, perusahaan juga berperan dalam mendukung pertanian ramah lingkungan melalui pemanfaatan kompos organik. Produk dan layanan perusahaan tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal tetapi dipasarkan

kepada masyarakat dan mitra peternak. Dengan sistem usaha yang terintegrasi, perusahaan mampu menjaga keberlanjutan produksi dan memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT Agrikencana Perkasa menggunakan sistem manajemen modern berbasis teknologi sederhana seperti ERP berbasis Excel Link untuk pencatatan stok dan distribusi secara real-time. Perusahaan juga didukung oleh fasilitas operasional seperti *forklift*, sistem absensi *fingerprint*, dan CCTV untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan kerja. Salah satu keunggulan perusahaan adalah penerapan *zero waste system*, yaitu pemanfaatan limbah peternakan menjadi kompos organik yang memiliki nilai ekonomi. Kompos tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian internal maupun didistribusikan kepada petani sekitar. Selain itu, perusahaan memiliki sistem distribusi pakan ternak yang terorganisasi melalui outlet resmi dan pengiriman langsung kepada peternak mitra. Pendistribusian dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu agar produk tetap terjaga. Penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan terhadap efisiensi dan keberlanjutan. Dengan dukungan manajemen yang visioner dan inovasi berkelanjutan, PT Agrikencana Perkasa terus berkembang sebagai perusahaan agrikultur yang berkontribusi pada sektor pertanian dan peternakan.

4.1.2 Sejarah Perusahaan

PT Agrikencana Perkasa berdiri pada tahun 2009 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur dengan fokus awal pada produksi growbag dan

growmi. Produk tersebut berupa bakteri baik yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah serta mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Pada awal berdirinya, perusahaan menjalankan produksi dalam skala kecil dan melayani kebutuhan petani lokal. Growbag dan growmi mendapat respons positif karena mampu meningkatkan kesuburan tanah dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Keberhasilan produk ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk membangun reputasi sebagai perusahaan agrikultur berbasis inovasi. Pada tahun 2010, perusahaan resmi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan ini memperkuat legalitas perusahaan dan membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Sejak saat itu, PT Agrikencana Perkasa mulai membangun sistem manajemen dan jaringan kemitraan yang lebih profesional.

Seiring perkembangan usaha, PT Agrikencana Perkasa melakukan diversifikasi bisnis dengan mendirikan unit peternakan ayam petelur pada tahun 2019. Pada tahap awal, peternakan memiliki sekitar 200 ekor ayam yang dikelola menggunakan kandang modern. Pengembangan peternakan meningkatkan kebutuhan pakan sehingga perusahaan mulai memproduksi pakan ternak secara mandiri. Produksi pakan yang awalnya hanya untuk kebutuhan internal kemudian berkembang dan dipasarkan kepada peternak di wilayah sekitar Klaten. Untuk memperluas pemasaran, perusahaan membuka outlet strategis di dekat Luwes Ceper. Perusahaan juga mengembangkan konsep agrikultur terpadu melalui integrasi peternakan, produksi pakan, dan pertanian berbasis probiotik. Hingga saat ini, PT Agrikencana Perkasa telah ber-

kembang dengan sekitar 113 karyawan dan memelihara sekitar 45.000 ekor ayam petelur serta pulet. Perkembangan tersebut menunjukkan transformasi perusahaan dari usaha kecil menjadi perusahaan agrikultur terpadu yang terus berkembang.

4.1.3 Visi Misi

4.1.3.1 Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan global terkemuka di bidang bioteknologi modern, agribisnis dan agroindustry.”

4.1.3.2 Misi Perusahaan

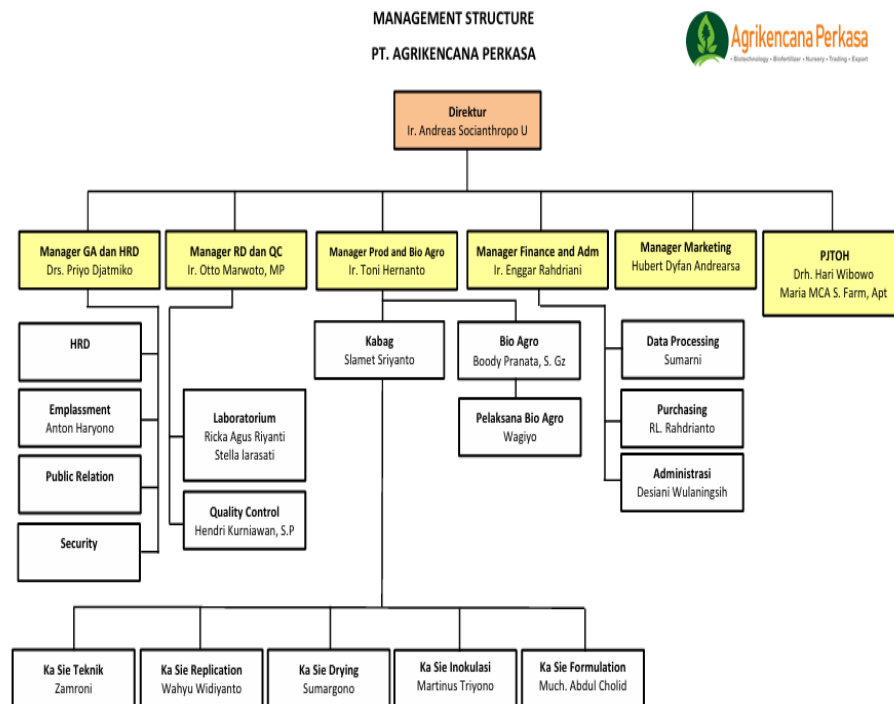
1. Menyediakan teknologi berasaskan bioteknologi terapan untuk petani, peternak, agribisnis dan agroindustri.
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mitra perusahaan

4.1.4 Budaya Perusahaan

Budaya kerja di PT Agrikencana Perkasa dibangun berdasarkan nilai profesionalisme, kerja sama tim, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai perusahaan di bidang pertanian, peternakan, dan produksi pakan ternak, perusahaan menerapkan sistem kerja yang terstruktur dengan menekankan efisiensi, tanggung jawab, serta komunikasi terbuka antar divisi. Koordinasi dilakukan melalui meeting rutin dan sistem ERP berbasis Excel Link yang memungkinkan pencatatan stok, produksi, dan distribusi dilakukan secara real-time. Setiap karyawan dibimbing untuk bekerja sesuai SOP, menjaga kejujuran, serta mengembangkan kemampuan melalui pelatihan internal dan pendampingan kerja. Selain itu, perusahaan juga menerapkan *green work culture* melalui 0 melalui pengembangan produk ramah lingkungan seperti

Growbag dan Growmi yang berbasis mikroorganisme baik untuk meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas pertanian. Perusahaan juga aktif menjalankan program sosial, seperti pemberian pupuk cair gratis kepada petani lokal serta edukasi mengenai penggunaan pupuk, teknik pertanian, dan pengelolaan limbah organik. Selain itu, perusahaan menjalin kerja sama dengan petani lokal, BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan berbagai pihak dalam pengelolaan pertanian dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan manajemen modern, inovasi berkelanjutan, dan kepedulian sosial, PT Agrikencana Perkasa menunjukkan budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas dan keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT Agrikencana Perkasa

Sumber: PT Agrikencana Perkasa, 2025

4.1.6 Tugas dan Fungsi Divisi

1. Direktur: Ir. Andreas Socianthropo U

Peran: Pemimpin tertinggi dalam Perusahaan (CEO)

Tanggung jawab:

- a. Menentukan arah dan kebijakan strategis perusahaan.
- b. Mengawasi seluruh aktivitas manajerial.

c. Mengambil keputusan penting menyangkut operasional dan pengembangan usaha.

2. Manajer GA dan HRD: Drs. Priyo Djatmiko

Peran: Mengelola urusan umum dan sumber daya manusia (HR).

Tugas-tugas bagian di bawahnya:

a. HRD: Rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan manajemen SDM.

b. *Emplassment* (Anton Haryono): Penempatan dan rotasi pegawai sesuai kebutuhan operasional.

c. *Public Relation*: Membangun hubungan baik dengan pihak luar dan menjaga citra perusahaan.

d. *Security*: Keamanan lingkungan dan aset perusahaan.

3. Manajer RD dan QC: Ir. Otto Marwoto, MP

Peran: Menangani penelitian dan pengembangan (R&D) serta pengendalian mutu (QC).

Tugas-tugas bagian di bawahnya:

a. Laboratorium (Ricka Agus Riyanti & Stella Iarasati): Penelitian, pengujian produk, dan inovasi bioteknologi.

b. *Quality Control* (Hendri Kurniawan, S.P): Pengawasan mutu produk agar sesuai standar.

4. Manajer Produksi dan Bio Agro: Ir. Toni Hernanto

Peran: Mengawasi kegiatan produksi dan pengelolaan produk Bio Agro.

Tugas-tugas bagian di bawahnya:

- a. Kabag (Slamet Sriyanto): Kepala bagian produksi, mengatur operasional harian.
 - b. Bio Agro (Boody Pranata, S.Gz): Pengembangan dan produksi produk berbasis bioteknologi.
 - c. Pelaksana Bio Agro (Wagiyo): Eksekutor proses produksi Bio Agro.
5. Ka Sie (Kepala Seksi):
- a. Teknik (Zamroni): Perawatan dan perbaikan mesin/peralatan.
 - b. *Replication* (Wahyu Widiyanto): Replikasi bibit atau mikroorganisme.
 - c. *Drying* (Sumargono): Proses pengeringan produk.
 - d. Inokulasi (Martinus Triyono): Proses inokulasi mikroorganisme ke media.
- Formulation (Much. Abdul Cholid): Peracikan formulasi akhir produk.
6. *Manager Finance* dan Administrasi: Ir. Enggar Rahradiani
- Peran: Mengatur keuangan dan administrasi perusahaan.
- Tugas-tugas:
- a. Menyusun laporan keuangan.
 - b. Mengelola arus kas, anggaran, dan transaksi.
 - c. Pengarsipan dan pencatatan administrasi perusahaan.
7. *Manager Marketing*: Hubert Dyfan Andrearsa
- Peran: Bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan produk.
- Tugas-tugas bagian di bawahnya:
- a. *Data Processing* (Sumarni): Mengolah data pasar dan penjualan.

b. *Purchasing* (R.L. Rahdrianto): Pengadaan bahan/material yang dibutuhkan. Administrasi (Desiani Wulaniingsih): Dokumentasi dan korespondensi dalam tim marketing.

8. PJTOH: Drh. Hari Wibowo & Maria MCA S. Farm, Apt

Peran: Penanggung jawab teknis operasional harian, terutama di bidang regulasi atau produk yang membutuhkan pengawasan ahli (seperti farmasi atau peternakan).

Tugas-tugas:

- a. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi.
- b. Memberikan supervisi teknis.
- c. Terkait legalitas dan keamanan produk biologis atau farmasi.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji penerapan CSR PT Agrikencana Perkasa pada petani lokal di Desa Ceper, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menjabarkan bentuk dan pelaksanaan program CSR berdasarkan dimensi tanggung jawab sosial dalam Piramida CSR Carroll (1991), yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropis. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan CSR serta dampaknya terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan petani lokal di Desa Ceper.

4.2.1 Penerapan CSR PT Agrikencana Perkasa tersebut ditinjau berdasarkan analisis pendekatan Piramida Carroll. (Tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi)

4.2.1.1 Bentuk Program CSR PT Agrikencana Perkasa

Bentuk dan pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa pada petani lokal di Desa Ceper Kabupaten Klaten diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Program-program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Untuk mengetahui bentuk program CSR yang dilaksanakan PT Agrikencana Perkasa, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

“Program CSR PT Agrikencana Perkasa kepada petani lokal tidak hanya berupa pemberian bantuan pupuk, tetapi juga pendampingan dalam penggunaannya. Bantuan yang diberikan meliputi pupuk cair, pupuk kompos, dan pupuk kandang sesuai kebutuhan petani. Sebelum bantuan disalurkan, perusahaan melakukan survei lapangan dan pengecekan pH tanah guna menentukan jenis bantuan yang sesuai. Selain itu, perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan pupuk secara rutin. PT Agrikencana Perkasa juga menjalankan program pendidikan melalui Institut Agrikencana Perkasa sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan.”

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh informan Q2 selaku Asisten HRD

PT Agrikencana Perkasa yang menyatakan bahwa:

“Bantuan pupuk yang diberikan kepada petani disesuaikan dengan kebutuhan lahan dan tanaman. Untuk perbaikan kualitas tanah, perusahaan memberikan pupuk Growbag yang mengandung bakteri

baik dan digunakan pada lahan dengan tingkat pH di bawah 6. Adapun untuk mendukung pertumbuhan tanaman, perusahaan memberikan pupuk Growmy yang terdiri atas pupuk vegetatif untuk fase awal pertumbuhan tanaman, pupuk generatif untuk mendukung perkembangan batang dan daun, serta pupuk mature yang berfungsi membantu proses pemasakan buah agar menghasilkan ukuran yang lebih besar dan rasa yang lebih manis. Informan juga menjelaskan bahwa pupuk tersebut diproduksi dari bahan organik berupa kotoran sapi (*rumate*) dan kotoran ayam (*kohe*), dengan kotoran sapi digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan pupuk Growbag. Selain pemberian bantuan pupuk, perusahaan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada petani terkait penggunaan pupuk yang dilaksanakan secara rutin setiap hari pukul 09.00–15.00 WIB di lingkungan perusahaan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai penggunaan pupuk yang tepat sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan Q3 selaku petani penerima program CSR PT Agrikencana Perkasa yang menyatakan bahwa:

"Bantuan yang saya terima dari PT Agrikencana Perkasa berupa pupuk cair (*liquid*), pupuk kompos, serta pelatihan terkait penggunaannya. Saya mengetahui adanya program CSR tersebut dari rekan sesama petani, yaitu Bapak Priyo, yang menginformasikan dan mengajak saya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan perusahaan. Menurut saya, bantuan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan karena perusahaan memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kebutuhan yang dimiliki. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa saya membutuhkan pupuk yang dapat membantu meningkatkan kualitas tanaman buah durian agar dapat berbuah dengan baik serta menghasilkan buah yang memiliki rasa yang lebih baik. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan perusahaan dirasakan cukup relevan dengan kebutuhan usaha pertanian yang saya jalankan."

Selain itu, informan Q4 selaku petani penerima program CSR PT Agrikencana Perkasa juga menyampaikan bahwa:

"Bentuk bantuan yang diterima oleh kelompok petani berupa pupuk cair (*liquid*) dan pupuk kompos. Untuk pupuk kompos, jumlah yang diberikan mencapai sekitar satu ton dan didistribusikan kepada anggota Paguyuban Petani Ceper. Selain bantuan berupa sarana produksi pertanian, perusahaan juga memberikan pelatihan mengenai tata cara penggunaan pupuk yang baik dan benar agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani. Saya mengetahui infor-

masi mengenai program CSR tersebut dari Bapak Priyo yang merupakan teman saya di lingkungan gereja. Menurut saya, bantuan yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan petani karena sebelum pelaksanaan program dilakukan sosialisasi dan diskusi melalui pertemuan langsung maupun grup WhatsApp. Melalui proses tersebut, petani dapat menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran."

Berdasarkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi juga melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori Carroll (1991) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Q1, Q2, Q3, dan Q4 diketahui bahwa bentuk program CSR PT Agrikencana Perkasa berupa bantuan pupuk cair, pupuk kompos, dan pupuk kandang yang disertai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada petani. Program tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan petani berdasarkan hasil survei dan diskusi yang dilakukan perusahaan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR PT Agrikencana Perkasa tidak hanya berupa pemberian bantuan fisik, tetapi juga pemberdayaan petani melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian.

4.2.1.2 Tanggung Jawab Filantropi

Tanggung jawab sukarela merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan melalui kontribusi sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, tanggung jawab filantropi

PT Agrikencana Perkasa ditunjukkan melalui pemberian bantuan pertanian, sosialisasi, serta pendampingan kepada petani lokal dan masyarakat sekitar.

Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab filantropi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima manfaat program CSR.

Informan Q1 menyatakan bahwa:

“Dalam aspek filantropi, perusahaan juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap satu bulan sekali. Selain itu, tersedia klinik gratis di lingkungan perusahaan yang menyediakan obat-obatan tanpa dipungut biaya bagi karyawan maupun masyarakat sekitar. Informan menjelaskan bahwa informasi mengenai layanan ini umumnya tersebar dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat. Dari sisi dampak sosial, informan menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang kembali datang ke perusahaan untuk menerima bantuan CSR karena merasa terbantu, khususnya dalam peningkatan hasil panen. Informan juga menambahkan bahwa masyarakat sangat antusias dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan, terutama karena petani tidak lagi terlalu bergantung pada pupuk kimia. Dari sisi ekonomi, informan menilai bahwa sektor pertanian saat ini masih kurang mendapatkan perhatian, padahal pada masa sebelumnya Indonesia merupakan negara agraris yang mampu mengeksport hasil pertanian, namun saat ini justru lebih banyak melakukan impor.”

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Informan Q2 selaku Devisi

Replikasi menyatakan bahwa:

“Informan menyampaikan bahwa perusahaan juga memiliki lembaga pendidikan, yaitu Institut Agrikencana yang baru mulai beroperasi di Sedayu, dengan fokus pembelajaran pada bidang pertanian dan peternakan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga menyalurkan hasil peternakan sapi kepada pondok pesantren Sunan Kalijogo serta kepada para karyawan perusahaan. Dari sisi dampak sosial, informan menilai bahwa kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya program-program tersebut. Sementara itu, dari aspek ekonomi, informan berpendapat bahwa perusahaan memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani yang sebelumnya kehilangan harapan dalam sektor pertanian.”

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Informan Q3 selaku petani

buah durian yang menerima CSR perusahaan, yang menjelaskan bahwa:

"Bantuan yang diberikan perusahaan tidak hanya berupa pupuk liquid, tetapi juga pupuk kompos atau pupuk kandang sesuai dengan kebutuhan petani. Selain memberikan bantuan, pihak perusahaan juga turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi tanah dan mengukur pH tanah di lahan perkebunan sebelum memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai."

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q4 selaku petani padi dan jagung yang menerima CSR perusahaan, yang menyatakan bahwa:

"Perusahaan pernah memberikan bantuan pupuk kompos sebanyak satu ton kepada kelompok paguyuban petani di Desa Ceper. Bantuan tersebut kemudian dibagikan kepada anggota paguyuban petani yang berada di wilayah Desa Ceper sehingga dapat dimanfaatkan oleh para petani yang membutuhkan."

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Carroll (1991), tanggung jawab filantropi merupakan kontribusi sosial sukarela dari perusahaan yang melampaui kewajiban minimum hukum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Porter dan Kramer (2011) juga menegaskan bahwa inisiatif sukarela ini mampu menciptakan nilai bersama (*Creating Shared Value*). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadchrrozi (2021) yang menemukan bahwa implementasi tanggung jawab filantropi secara tulus dan konsisten tidak hanya membantu meringankan permasalahan sosial di masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan reputasi positif perusahaan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab filantropi PT Agrikencana Perkasa telah diwujudkan dengan sangat baik melalui pemberian bantuan sosial tanpa pamrih, seperti penyediaan pupuk secara cuma-cuma, fasilitas layanan kesehatan gratis (klinik obat), pendirian lembaga edukasi pertanian (Institut Agrikencana), serta sumbangan komoditas peternakan kepada pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

4.2.1.3 Tanggung Jawab Etika

Tanggung jawab etis berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam penerapan CSR, tanggung jawab etika tercermin melalui perlakuan yang setara kepada seluruh penerima manfaat serta keterbukaan perusahaan dalam menerima masukan dari masyarakat. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab etika di PT Agrikencana Perkasa, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program CSR, perusahaan berupaya menerapkan prinsip etika dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani. Informan menjelaskan bahwa sebelum memberikan bantuan, perusahaan terlebih dahulu melakukan identifikasi terkait luas lahan yang dimiliki petani serta jenis tanaman yang dibudidayakan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani yang membutuhkan. Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa perusahaan sangat terbuka terhadap berbagai keluhan dan masukan dari petani. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, pihak perusahaan sering kali turun langsung ke lapangan guna melihat permasalahan yang dihadapi petani serta mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q2 selaku Devisi Replika menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program CSR, perusahaan menyediakan ruang konsultasi yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Melalui fasilitas tersebut, petani dapat berkonsultasi secara langsung mengenai kondisi lahan, penggunaan pupuk, maupun kendala yang dihadapi selama proses budidaya. Informan juga menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya menerima masukan secara administratif, tetapi juga melakukan pendekatan secara langsung dengan turun ke lapangan. Menurut informan, penanganan keluhan petani umumnya dilakukan oleh pihak HRD bersama tim perus-

ahaan sehingga setiap permasalahan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dicari solusi yang tepat.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q3 selaku petani buah

durian yang menerima CSR perusahaan. Informan menjelaskan bahwa:

“perusahaan menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan dan keluhan dari petani. Apabila bantuan pupuk yang diberikan belum memberikan hasil yang sesuai atau kondisi tanah belum mengalami perbaikan, perusahaan bersedia menerima keluhan dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Menurut informan, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga berupaya mencari solusi bersama agar permasalahan pertanian yang dialami petani dapat diatasi dengan lebih baik.”

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Informan Q4 selaku petani ja-

gung yang menerima CSR perusahaan. Informan menjelaskan bahwa:

“Perusahaan bersedia menjalin kerja sama dengan petani jagung melalui sistem kemitraan yang dilakukan secara transparan. Dalam kerja sama tersebut, perusahaan membeli hasil panen jagung dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasaran. Selain itu, kerja sama tersebut juga didukung dengan adanya perjanjian tertulis atau kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu satu tahun. Menurut informan, keberadaan kontrak tersebut memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kerja sama dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.”

Berdasarkan teori etika bisnis yang dikemukakan oleh Bertens (2013), setiap aktivitas bisnis wajib mempertimbangkan norma moral dengan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pihak. Muslich (2004) turut menambahkan prinsip transparansi, keadilan, dan kesetaraan sebagai pondasi utama etika perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur (2025) yang menemukan bahwa integrasi nilai etika dalam program CSR yang diwujudkan melalui keterbukaan, responsivitas terhadap keluhan mitra, serta asas keadilan mampu menciptakan keunggulan kompetitif dan loyalitas sosial jangka panjang.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab etika PT Agrikencana Perkasa telah terimplementasi melalui penerapan asas transparansi dan keadilan; terbukti dari kesediaan perusahaan turun langsung merespons keluhan petani, menjalin sistem kontrak pembelian hasil panen yang transparan secara tertulis, serta tidak membedakan pelayanan antar kelompok tani.

4.2.1.4 Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban perusahaan untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan CSR, tanggung jawab hukum tercermin melalui kepatuhan terhadap prosedur perusahaan, transparansi pelaksanaan program, serta adanya mekanisme pelaporan yang jelas. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab hukum di PT Agrikencana Perkasa, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan pelaksanaan program CSR. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

“Menurut informan, pelaksanaan program CSR yang dijalankan perusahaan belum memiliki regulasi atau pedoman khusus yang ditetapkan oleh pemerintah maupun standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur pelaksanaan CSR. Namun demikian, perusahaan tetap melakukan pencatatan dan pelaporan terkait penyaluran bantuan, khususnya pemberian pupuk kepada petani penerima manfaat. Informan juga menjelaskan bahwa perusahaan berupaya menjalankan program CSR secara transparan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga mengajak berbagai pihak seperti pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok masyarakat untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan program CSR, meskipun tidak semua pihak bersedia berpartisipasi.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q2 selaku Divisi Replika yang menyatakan bahwa:

“Informan menyampaikan bahwa perusahaan belum memiliki regulasi atau pedoman khusus terkait pelaksanaan CSR. Namun, untuk mendukung keterbukaan informasi dan komunikasi dengan penerima manfaat, perusahaan membentuk grup komunikasi yang melibatkan petani maupun paguyuban petani. Melalui grup tersebut, informasi terkait program CSR dapat disampaikan secara langsung sehingga memudahkan koordinasi antara perusahaan dan masyarakat.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q3 selaku petani buah durian yang menyatakan bahwa:

“Menurut informan, mekanisme pelaksanaan program CSR cukup sederhana, yaitu petani dapat menyampaikan keluhan atau permasalahan yang dihadapi, kemudian perusahaan akan berupaya memberikan bantuan sesuai kebutuhan tanpa meminta imbalan apa pun. Informan juga menyampaikan bahwa selama menerima bantuan CSR tidak pernah mengalami kendala atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan program.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q4 selaku petani padi dan jagung yang menyatakan bahwa:

“Informan menjelaskan bahwa perusahaan memberikan penjelasan mengenai aturan dan tata cara penggunaan bantuan yang diberikan kepada petani. Meskipun tidak terdapat persyaratan khusus untuk menerima bantuan, mekanisme pelaksanaannya tetap dijelaskan oleh perusahaan sehingga petani memahami prosedur yang harus dilakukan apabila membutuhkan bantuan atau pendampingan. Informan juga menyatakan bahwa selama mengikuti program CSR tidak pernah mengalami permasalahan maupun ketidakjelasan terkait pelaksanaan program.”

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Carroll (1991), tanggung jawab hukum mengharuskan perusahaan mematuhi segala regulasi dan mengadopsi prinsip kepatuhan prosedural. Untung (2014) menegaskan bahwa elemen transparansi jalannya program merupakan esensi dasar dari akuntabilitas hukum sebuah entitas korporat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk. (2025) yang mene-

mukan bahwa meskipun secara normatif perusahaan telah melaksanakan CSR, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang baku sering kali melemahkan aspek konsistensi pengelolaan dan evaluasi legalitas program di lapangan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum PT Agrikencana Perkasa difokuskan pada upaya transparansi melalui grup komunikasi dan pencatatan distribusi bantuan, namun pemenuhan standar kepatuhan administratifnya masih memiliki kelemahan karena belum ditopang oleh dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan CSR yang tertulis dan mengikat. Secara umum telah memenuhi kewajiban hukum terkait pelaksanaan CSR, meskipun masih diperlukan penguatan sistem pengelolaan melalui SOP agar pelaksanaan lebih terstruktur.

4.2.1.5 Tanggung Jawab Ekonomi

Tanggung jawab ekonomi adalah dasar dari pelaksanaan CSR yang berkaitan dengan upaya perusahaan dalam menciptakan manfaat ekonomi bagi perusahaan maupun masyarakat. Dalam penelitian ini, tanggung jawab ekonomi PT Agrikencana Perkasa dapat dilihat dari kontribusi perusahaan dalam mendukung kegiatan pertanian serta memberikan manfaat ekonomi kepada petani lokal. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab ekonomi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

“Manfaat ekonomi yang diharapkan dari program CSR adalah meningkatnya produktivitas pertanian melalui perbaikan kualitas tanah.

Informan menjelaskan bahwa banyak lahan pertanian mengalami penurunan kesuburan akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan sehingga nilai pH tanah menjadi rendah. Oleh karena itu, perusahaan berupaya membantu petani memperbaiki kondisi tanah terlebih dahulu agar hasil pertanian dapat meningkat. Selain itu, program CSR juga memberikan dampak terhadap pemasaran hasil pertanian karena perusahaan bersedia membeli hasil panen petani untuk komoditas tertentu seperti jagung dan kedelai. Sementara itu, untuk komoditas padi, pemasaran hasil panen tetap dilakukan secara mandiri oleh petani.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q2 selaku Divisi Replika yang menyatakan bahwa:

“Menurut informan, program CSR memberikan manfaat ekonomi bagi petani melalui pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pemanfaatan bahan organik yang lebih ramah lingkungan. Kondisi tersebut membantu petani menghemat biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Informan juga menjelaskan bahwa dampak program dapat dilihat dari laporan perkembangan hasil panen petani yang cenderung meningkat. Selain itu, pihak perusahaan juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pertanian yang menjadi penerima manfaat program CSR.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q3 selaku petani buah durian yang menyatakan bahwa:

“Menurut informan, program CSR memberikan dampak positif terhadap produktivitas perkebunan durian. Setelah mendapatkan bantuan dan pendampingan dari perusahaan, kondisi tanaman menjadi lebih baik sehingga hasil panen meningkat. Informan menjelaskan bahwa perusahaan tidak membantu pemasaran hasil buah durian, namun bantuan yang diberikan sangat bermanfaat dalam memperbaiki kondisi lahan dan meningkatkan hasil produksi perkebunan.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q4 selaku petani padi dan jagung yang menyatakan bahwa:

“Informan menyampaikan bahwa program CSR memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi petani karena perusahaan bersedia membeli hasil panen jagung yang dihasilkan. Kerja sama tersebut dilakukan melalui kontrak selama satu tahun dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Menurut informan, sistem tersebut memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani, sehingga

membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar.”

Berdasarkan teori pembangunan ekonomi oleh Todaro dan Smith (2015), keberhasilan pengentasan kendala struktural desa sangat bergantung pada intervensi peningkatan produktivitas serta efisiensi biaya pertanian. Carroll (1991) sendiri menempatkan aspek ekonomi sebagai fondasi kelangsungan bisnis yang harus memberikan faedah finansial komunal. Hal ini sejalan dengan penelitian Waghmare *et al.* (2025) dan Muangsan *et al.* (2026) yang menemukan bahwa inisiatif CSR yang fokus pada ketahanan ekonomi mitra (seperti kepastian rantai pasok dan kontrak stabil) secara signifikan mampu mengangkat kesejahteraan lokal sekaligus menumbuhkan resiliensi bisnis di pasar.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ekonomi PT Agrikencana Perkasa telah direalisasikan dengan sukses melalui penghematan biaya operasional petani dari substitusi pupuk kimia, perbaikan kualitas lahan yang memicu lonjakan produktivitas panen, serta jaminan kestabilan ekonomi lewat sistem pembelian kontrak jagung dan kedelai di atas harga pasar. Maka dari itu, untuk memperjelas hasil analisis tersebut, berikut disajikan gambaran Piramida CSR Carroll (1991) untuk PT Agrikencana Perkasa, sebagai kerangka dalam menginterpretasikan temuan penelitian ini.



Gambar 4. 3 Piramida Carroll PT Agrikencana Perkasa

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026

4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa pada Petani Lokal di Desa Ceper, Kabupaten Klaten Berdasarkan Pendekatan 5M+1E

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa pada petani lokal di Desa Ceper, Kabupaten Klaten berdasarkan pendekatan 5M+1E. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kendala pelaksanaan program CSR secara menyeluruh melalui enam aspek, yaitu *Man* (manusia), *Money* (dana), *Material* (bahan/sarana), *Method* (metode), *Machine* (mesin/peralatan), dan *Environment* (lingkungan). Keenam aspek tersebut digunakan untuk menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi PT Agrikencana Perkasa dalam menjalankan program CSR kepada petani lokal.

1. *Man* (Manusia)

Faktor manusia (*man*) berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Keberadaan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program CSR. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait.

Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

"Pelaksanaan CSR ditangani langsung oleh saya sendiri pihak perusahaan tanpa adanya divisi khusus yang menangani CSR secara struktural. Informan menjelaskan bahwa jumlah tenaga yang terlibat dalam pengelolaan CSR masih terbatas sehingga satu orang dapat merangkap beberapa tugas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pendataan program. keterbatasan tenaga pengelola ini men-

jadi salah satu kendala karena kegiatan CSR belum dapat ditangani secara fokus dan berkelanjutan."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Q2 selaku Divisi Replikasi yang menyatakan bahwa:

"Keterlibatannya dalam program CSR masih terbatas pada penerimaan arahan dari pihak perusahaan, sehingga belum ada pembagian tugas yang jelas antara petugas CSR dengan pekerjaan lain di perusahaan. Informan menyampaikan bahwa kondisi ini terkadang membuat penanganan keluhan atau permintaan petani menjadi tidak secepat yang diharapkan karena tenaga pengelola CSR juga harus menyelesaikan tugas pokoknya yang lain."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia yang menangani program CSR di PT Agrikencana Perkasa masih belum ada. Selain belum adanya divisi khusus CSR, personel yang terlibat juga masih merangkap tugas lain sehingga pelaksanaan program belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain jumlah tenaga pelaksana, kompetensi dan keahlian teknis sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program CSR. Kompetensi tersebut diperlukan agar kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan yang diberikan kepada petani dapat berjalan secara efektif.

Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

"Selama ini tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan CSR belum seluruhnya memiliki latar belakang khusus di bidang pemberdayaan masyarakat maupun pertanian. Pendampingan kepada petani lebih banyak dilakukan berdasarkan pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing petugas. Oleh karena itu, perusahaan masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan agar pendampingan yang diberikan dapat berjalan lebih optimal."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Q2 selaku Divisi Replikasi yang menyatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan program, saya belum secara rutin mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik pendampingan masyarakat atau pemberdayaan petani. Akibatnya, ketika menghadapi permasalahan tertentu di lapangan, petugas terkadang perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak lain yang lebih memahami kondisi teknis pertanian."

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan Q4 selaku petani buah durian yang menyatakan bahwa:

"Pendampingan dari perusahaan cukup membantu, namun petani berharap adanya pendampingan yang lebih intensif dan pelatihan teknis yang lebih mendalam agar petani dapat meningkatkan keterampilan dalam budidaya dan pengelolaan hasil pertanian."

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Agrikencana Perkasa belum ditangani oleh sumber daya manusia yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan program. Pelaksanaan CSR masih menjadi bagian dari tugas pegawai yang memiliki tanggung jawab lain sehingga pengelolaan program dilakukan secara rangkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum menempatkan fungsi CSR sebagai bagian yang memiliki pengelolaan tersendiri dalam struktur organisasi.

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, tetapi juga terhadap efektivitas pengelolaan program secara keseluruhan. Beban kerja yang terbagi pada beberapa fungsi menyebabkan proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi program belum dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, pelaksanaan CSR lebih banyak bergantung pada pengalaman dan inisiatif individu dibandingkan dengan sistem kerja yang terstruktur.

Dari sudut pandang manajemen operasional, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia tidak hanya dipahami sebagai jumlah tenaga kerja, tetapi juga berkaitan dengan pembagian tugas, kompetensi, dan keberlanjutan pengelolaan program. Apabila perusahaan mengalami pergantian personel atau peningkatan jumlah kegiatan CSR, maka potensi terjadinya ketidakkonsistenan pelaksanaan program akan semakin besar karena belum terdapat sumber daya manusia yang secara khusus bertanggung jawab terhadap seluruh proses CSR.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aspek *Man* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan CSR karena kualitas pengelolaan program sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam menyediakan sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi dan keahlian teknis sumber daya manusia pelaksana CSR masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Heizer dan Render (2014), sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, karena kualitas pelaksanaan program tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh kompetensi, keterampilan, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Wibisono (2007) juga menyatakan bahwa keberhasilan program CSR sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara efektif. Selain itu, keberadaan unit khusus pengelola CSR diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayah dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang menangani program sosial dapat menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian Bramono (2024) juga menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sangat memengaruhi keberhasilan implementasi program CSR. Dapat disimpulkan bahwa faktor manusia (*man*) menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa. Kendala tersebut ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah sumber daya manusia, belum adanya divisi khusus CSR, serta kompetensi dan keahlian teknis pelaksana yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. *Money* (Dana/Anggaran)

Faktor dana berkaitan dengan ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang menunjang pelaksanaan program CSR. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

“Anggaran CSR yang dialokasikan perusahaan setiap tahun masih belum ditetapkan dalam pos anggaran khusus yang tetap. Informan menjelaskan bahwa besaran dana CSR biasanya menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan pada tahun berjalan, sehingga jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada petani juga ikut berubah-ubah setiap tahunnya. Hal ini membuat perusahaan belum dapat memperluas jangkauan penerima manfaat secara maksimal.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Q2 selaku Divisi Replikasi yang menyatakan bahwa:

“Pencairan dana untuk kebutuhan CSR, seperti pembelian pupuk atau bantuan sarana pertanian, terkadang membutuhkan proses dan

waktu karena harus melalui persetujuan dari pihak manajemen terlebih dahulu. Informan menyampaikan bahwa kondisi ini terkadang membuat penyaluran bantuan kepada petani tidak selalu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan di lapangan, terutama pada masa tanam.”

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran pelaksanaan CSR belum memiliki alokasi yang bersifat tetap. Besaran dana yang digunakan masih disesuaikan dengan kondisi perusahaan serta kebutuhan program yang akan dilaksanakan pada setiap periode.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tetap memiliki komitmen dalam melaksanakan CSR, namun keberlangsungan program masih dipengaruhi oleh kemampuan finansial perusahaan. Dengan kata lain, perencanaan program belum sepenuhnya didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan sejak awal, melainkan masih bersifat fleksibel mengikuti kondisi perusahaan.

Dari sisi pengelolaan program, mekanisme pendanaan yang belum memiliki alokasi tetap dapat memengaruhi kontinuitas pelaksanaan CSR. Program yang membutuhkan pendampingan jangka panjang berpotensi mengalami penyesuaian apabila terjadi perubahan kondisi keuangan perusahaan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tetap berusaha mempertahankan pelaksanaan CSR sehingga fleksibilitas anggaran tidak serta-merta menghentikan kegiatan yang telah direncanakan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran CSR masih lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan program dibandingkan pada sistem penganggaran yang terstruktur. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan anggaran yang lebih sistematis akan membantu perusahaan dalam menjaga keberlanjutan

pelaksanaan CSR sekaligus meningkatkan kepastian pelaksanaan setiap program pada periode berikutnya.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek **Money** menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan CSR karena mekanisme pendanaan yang belum memiliki alokasi tetap berpotensi memengaruhi kesinambungan program dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rudito dan Famiola (2013), kejelasan alokasi pos anggaran serta fleksibilitas pencairan dana menentukan efektivitas penyaluran program sosial. Menurut Heizer dan Render (2014), ketidakpastian aliran *Money* dapat mendisrupsi seluruh aktivitas di akar rumput. Seperti penelitian Zalyanti (2026) yang menyoroti bahwa alokasi anggaran CSR yang fluktuatif tanpa penetapan yang proporsional dan pasti cenderung menghambat kuantitas jangkauan bantuan.

Selain itu ada ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang menunjang pelaksanaan program CSR. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat memengaruhi keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan program CSR. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

"Anggaran CSR yang dialokasikan perusahaan setiap tahun masih bersifat terbatas dan belum ditetapkan dalam pos anggaran khusus yang tetap. besaran dana CSR biasanya menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan pada tahun berjalan, sehingga jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada petani juga ikut berubah-ubah setiap tahunnya. Hal ini membuat perusahaan belum dapat memperluas jangkauan penerima manfaat secara maksimal."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Q2 selaku Divisi Replikasi yang menyatakan bahwa:

"Pencairan dana untuk kebutuhan CSR, seperti pembelian pupuk atau bantuan sarana pertanian, terkadang membutuhkan proses dan waktu karena harus melalui persetujuan dari pihak manajemen terlebih dahulu. Informan menyampaikan bahwa kondisi ini terkadang membuat penyaluran bantuan kepada petani tidak selalu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan di lapangan, terutama pada masa tanam."

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rudito dan Famiola (2013), kejelasan alokasi pos anggaran serta fleksibilitas pencairan dana menentukan efektivitas penyaluran program sosial. Menurut Heizer dan Render (2014), ketidakpastian aliran dana (*money*) dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zalyanti (2026) yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran CSR yang fluktuatif dan belum ditetapkan secara pasti dapat menghambat keberlanjutan program serta membatasi jangkauan penerima manfaat.

Hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kendala pada aspek dana dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa disebabkan oleh belum adanya pos anggaran CSR yang tetap serta proses pencairan dana yang masih memerlukan persetujuan manajemen. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan jumlah bantuan, termasuk pupuk yang dapat disalurkan kepada petani, sehingga jangkauan penerima manfaat belum dapat dioptimalkan.

3. *Material* (Bahan/Sarana)

Faktor material berkaitan dengan ketersediaan bahan dan sarana yang diberikan perusahaan kepada petani dalam mendukung pelaksanaan program CSR.

Untuk mengetahui kondisi pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

"Perusahaan menyediakan bantuan berupa pupuk cair (*liquid fertilizer*), pupuk kompos, dan sarana pendukung pertanian lainnya. Petani dapat mengambil pupuk sesuai kebutuhan dengan membawa wadah sendiri, seperti jerigen atau galon bekas air mineral. Satu liter pupuk cair dapat digunakan untuk lahan sekitar 1.000 meter persegi, sehingga bantuan yang diberikan sudah cukup membantu kebutuhan petani."

Selain itu, Informan Q4 selaku petani jagung juga menyampaikan bahwa:

"Selama ini perusahaan cukup terbuka dalam memberikan bantuan pupuk. Petani dapat mengambil pupuk sesuai kebutuhan, sehingga sangat membantu dalam mengurangi biaya produksi pertanian."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa PT Agrikencana

Perkasa telah menyediakan bantuan material dalam jumlah yang relatif memadai. Bantuan berupa pupuk cair, pupuk kompos, dan sarana pendukung pertanian lainnya dinilai mampu membantu petani dalam menunjang kegiatan budidaya serta mengurangi biaya produksi. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015) yang menyatakan bahwa ketersediaan input pertanian yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, Gasperz (2005) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan material yang sesuai akan mendukung efektivitas pelaksanaan suatu program.

Selain itu ada ketersediaan bahan dan sarana yang diberikan perusahaan kepada petani dalam mendukung pelaksanaan program CSR. Selain ketersediaan, kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan petani juga menjadi aspek penting da-

lam menunjang keberhasilan program. Untuk mengetahui kondisi pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

"Perusahaan menyediakan bantuan berupa pupuk cair (*liquid fertilizer*), pupuk kompos, dan sarana pendukung pertanian lainnya. Petani dapat mengambil pupuk sesuai kebutuhan dengan membawa wadah sendiri, seperti jerigen atau galon bekas air mineral. Satu liter pupuk cair dapat digunakan untuk lahan sekitar 1.000 meter persegi, sehingga bantuan yang diberikan sudah cukup membantu kebutuhan petani."

Selain itu, Informan Q4 selaku petani jagung juga menyampaikan bahwa:

"Selama ini perusahaan cukup terbuka dalam memberikan bantuan pupuk. Petani dapat mengambil pupuk sesuai kebutuhan, sehingga sangat membantu dalam mengurangi biaya produksi pertanian."

Berdasarkan hasil penelitian, aspek Material tidak ditemukan sebagai kendala utama dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Agrikencana Perkasa. Bantuan yang diberikan perusahaan berupa pupuk maupun sarana pendukung lainnya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan petani sehingga mampu menunjang pelaksanaan kegiatan pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat sebelum menentukan bentuk bantuan yang akan disalurkan.

Kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam efektivitas program pemberdayaan. Bantuan yang tepat sasaran tidak hanya meningkatkan manfaat yang diterima oleh petani, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya pemborosan sumber daya akibat pemberian bantuan yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, proses identifikasi kebutuhan yang dilakukan perusahaan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan CSR.

Selain itu, tidak ditemukannya kendala pada aspek Material menunjukkan bahwa komunikasi antara perusahaan dan petani telah berjalan cukup baik dalam menentukan jenis bantuan yang diperlukan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya menyalurkan bantuan berdasarkan pertimbangan internal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nyata yang dihadapi petani sebagai penerima manfaat. Pendekatan seperti ini mendukung terciptanya program CSR yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu program CSR tidak selalu ditentukan oleh besarnya jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh tingkat kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, aspek Material dalam penelitian ini justru menjadi faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa PT Agrikencana Perkasa telah menyediakan bantuan material dalam jumlah yang relatif memadai dan sesuai dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Bantuan berupa pupuk cair, pupuk kompos, dan sarana pendukung pertanian lainnya dinilai mampu membantu petani dalam menunjang kegiatan budidaya serta mengurangi biaya produksi. Kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan petani menunjukkan bahwa aspek material dalam pelaksanaan CSR telah berjalan dengan baik dan tidak menjadi kendala utama. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015) yang menyatakan bahwa ketersediaan input pertanian yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, Gasperz (2005) menyatakan bahwa pemenuhan

kebutuhan material yang sesuai akan mendukung efektivitas pelaksanaan suatu program.

Hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa aspek material dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa telah berjalan dengan baik. Ketersediaan bantuan material yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan petani menjadikan aspek ini tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program CSR.

4. *Method* (Metode)

Faktor metode berkaitan dengan cara, prosedur, dan standar operasional yang diterapkan selama pelaksanaan program CSR, termasuk tahap perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program CSR hingga saat ini belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi program. Kegiatan CSR selama ini lebih banyak berjalan berdasarkan kebiasaan dan inisiatif dari tim yang menangani, sehingga belum ada pedoman baku yang dapat dijadikan acuan secara konsisten.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Q2 selaku Devisi Replikasi yang menyatakan bahwa:

“Pemantauan terhadap perkembangan petani penerima manfaat memang dilakukan, namun belum melalui jadwal monitoring dan evaluasi yang tetap atau terjadwal secara rutin. Informan menyampaikan bahwa kunjungan ke lapangan dilakukan menyesuaikan kondisi dan waktu yang tersedia, bukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga evaluasi program belum berjalan secara sistematis.”

Selain itu prosedur, dan standar operasional yang diterapkan selama pelaksanaan program CSR, termasuk tahap perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

"Pelaksanaan program CSR hingga saat ini belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi program. Informan menjelaskan bahwa kegiatan CSR selama ini lebih banyak berjalan berdasarkan kebiasaan dan inisiatif dari tim yang menangani, sehingga belum ada pedoman baku yang dapat dijadikan acuan secara konsisten."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Q2 selaku Divisi Replikasi yang menyatakan bahwa:

"Pemantauan terhadap perkembangan petani penerima manfaat memang dilakukan, namun belum melalui jadwal monitoring dan evaluasi yang tetap atau terjadwal secara rutin. Informan menyampaikan bahwa kunjungan ke lapangan dilakukan menyesuaikan kondisi dan waktu yang tersedia, bukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga evaluasi program belum berjalan secara sistematis."

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Agrikencana Perkasa belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi secara tertulis. Selama ini pelaksanaan program masih mengacu pada arahan pimpinan, pengalaman kerja, serta kebiasaan yang telah diterapkan dalam kegiatan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki pola pelaksanaan CSR, namun belum didukung oleh sistem kerja yang terdokumentasi secara formal.

Tidak adanya SOP menyebabkan setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, belum memiliki pedoman yang baku. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada pengalaman dan pemahaman masing-masing pelaksana. Meskipun program tetap dapat berjalan, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pelaksanaan apabila terjadi pergantian personel maupun perubahan kebijakan perusahaan.

Selain memengaruhi konsistensi pelaksanaan program, belum adanya SOP juga berdampak terhadap proses evaluasi kegiatan. Tanpa adanya standar yang terdokumentasi, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membandingkan hasil pelaksanaan program antarperiode maupun mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, proses pembelajaran organisasi menjadi kurang optimal karena pengalaman pelaksanaan belum sepenuhnya terdokumentasi sebagai acuan pada kegiatan berikutnya.

Dari sudut pandang tata kelola organisasi, keberadaan SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan program. Oleh karena itu, temuan mengenai belum tersedianya SOP menjadi dasar utama dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penelitian ini sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa aspek metode masih menjadi kendala dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa. Hal ini disebab-

kan karena perusahaan belum memiliki SOP tertulis yang mengatur pelaksanaan program CSR secara jelas. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi program juga belum dilaksanakan secara terjadwal dan sistematis, sehingga pelaksanaan dan penilaian keberhasilan program belum dapat dilakukan secara optimal.

Pendekatan yang dikemukakan oleh Suharto (2010), implementasi prosedur kerja (*method*) perlu diformalkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis untuk meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Ketiadaan metode yang terstandar menyebabkan proses evaluasi menjadi kurang optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bramono (2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR memerlukan metode yang sistematis mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga ketiadaan SOP dapat menyebabkan pelaksanaan program cenderung bersifat reaktif dibandingkan proaktif.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aspek metode masih menjadi kendala dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa. Kendala tersebut ditunjukkan dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur pelaksanaan program CSR serta belum dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara terjadwal dan sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program masih bergantung pada kebiasaan dan inisiatif pelaksana, sehingga efektivitas program belum dapat diukur secara optimal.

5. *Machine* (Mesin/Peralatan)

Faktor mesin berkaitan dengan ketersediaan teknologi dan peralatan yang menunjang pelaksanaan program CSR, termasuk media komunikasi yang digun-

akan untuk sosialisasi kepada petani. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q1 selaku HRD menyatakan bahwa:

“Penyebaran informasi mengenai program CSR sejauh ini masih mengandalkan grup komunikasi sederhana dan komunikasi langsung dengan petani, karena perusahaan belum memiliki media informasi atau publikasi resmi seperti situs web maupun media sosial yang secara khusus digunakan untuk memperkenalkan program CSR kepada masyarakat luas. keterbatasan media ini membuat jangkauan informasi program belum merata.”

Selain itu ketersediaan teknologi dan peralatan yang menunjang pelaksanaan program CSR, termasuk media komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi kepada petani. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q2 selaku Divisi Replikasi menyatakan bahwa:

"Penyebaran informasi mengenai program CSR sejauh ini masih mengandalkan grup komunikasi sederhana dan komunikasi langsung dengan petani, karena perusahaan belum memiliki media informasi atau publikasi resmi seperti situs web maupun media sosial yang secara khusus digunakan untuk memperkenalkan program CSR kepada masyarakat luas. Informan menjelaskan bahwa keterbatasan media ini membuat jangkauan informasi program belum merata."

Dalam penelitian ini, aspek *Machine* dimaknai sebagai sarana, fasilitas, dan teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan masih mengandalkan komunikasi langsung dan aplikasi WhatsApp dalam menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi dengan petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi masih berfokus pada

kebutuhan komunikasi dan belum diarahkan sebagai sistem pendukung pengelolaan program CSR secara menyeluruh.

Keterbatasan pemanfaatan teknologi menyebabkan proses dokumentasi, penyimpanan data, pelaporan, maupun penyebaran informasi program masih dilakukan secara sederhana. Meskipun pendekatan tersebut dinilai cukup efektif untuk menjalin komunikasi dengan kelompok petani yang telah menjadi mitra perusahaan, sistem tersebut belum mampu mendukung pengelolaan informasi secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Dari perspektif manajemen, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyampaian informasi, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi program. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang masih terbatas menyebabkan proses pengelolaan CSR belum sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa aspek Machine masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan CSR. Pengembangan sistem informasi sederhana maupun media dokumentasi digital dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, transparansi, dan pengelolaan program CSR pada masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa aspek mesin masih menjadi kendala dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa. Hal ini disebab-

kan karena perusahaan belum memanfaatkan media informasi dan platform digital secara optimal untuk mendukung sosialisasi program CSR kepada masyarakat. Penyebaran informasi yang masih mengandalkan komunikasi langsung dan grup komunikasi sederhana menyebabkan jangkauan informasi program belum merata serta transparansi pelaksanaan program kepada masyarakat luas masih terbatas.

Berdasarkan kajian Heizer dan Render (2014), fasilitas teknologi informasi dan peralatan (*machine*) berperan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan suatu program. Wibisono (2007) juga menyatakan bahwa pemanfaatan infrastruktur teknologi dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan komunikasi program CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Waghmare *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa keterlambatan dalam mengadopsi platform publikasi digital, seperti situs web dan media sosial, dapat mengurangi jangkauan informasi serta transparansi program kepada masyarakat.

Disimpulkan bahwa aspek mesin masih menjadi kendala dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa. Kendala tersebut ditunjukkan oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital sebagai media sosialisasi program CSR. Penyebaran informasi yang masih mengandalkan komunikasi langsung dan grup komunikasi sederhana menyebabkan jangkauan informasi program kepada masyarakat belum merata dan transparansi pelaksanaan program belum dapat dilakukan secara maksimal.

6. *Environment* (Lingkungan)

Faktor lingkungan berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program CSR, seperti kondisi lahan, cuaca, serta partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait. Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

“Perusahaan telah mengajak berbagai pihak seperti pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam program CSR, namun tidak semua pihak bersedia ikut serta secara aktif. Informan menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang belum merata menjadi salah satu kendala dalam memperluas jangkauan dan keberlanjutan program di lapangan.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, khususnya tingkat partisipasi masyarakat, masih memengaruhi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Agrikencana Perkasa. Tidak seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan CSR tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan perusahaan sebagai pelaksana program, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kebutuhan, kesibukan dalam kegiatan pertanian, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program CSR. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran sehingga efektivitas pelaksanaan CSR masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Selain faktor sosial, kondisi lingkungan juga berkaitan dengan dinamika yang berkembang di sekitar wilayah operasional perusahaan. Perubahan kondisi

pertanian, cuaca, maupun karakteristik masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan program sehingga perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bentuk kegiatan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, aspek Environment menunjukkan bahwa keberhasilan CSR merupakan hasil interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan program CSR yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi petani lokal.

Berdasarkan teori intervensi sosial dari Ife (2013), faktor ekosistem (*Environment*) yang meliputi animo sosiokultural serta kondisi iklim sangat mendikte penetrasi program kelembagaan di desa. Kondisi cuaca hingga respon perangkat wilayah akan menjadi *barrier* jika tidak kondusif. Seperti penelitian yang digagas Lu (2020) serta Hidayah dkk. (2025) yang menemukan bahwa variabel alam yang fluktuatif dipadu dengan rendahnya kesadaran partisipasi kolektif secara konstan menjadi faktor ancaman eksternal yang paling sulit dikalkulasi dalam manajemen program sosial.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala pada faktor lingkungan diakibatkan oleh kondisi cuaca yang anomali serta karakteristik tingkat kesuburan tanah yang heterogen, ditambah dengan belum kooperatifnya sebagian

perangkat komunitas desa dalam bersinergi menjalankan inisiatif CSR tersebut secara kolektif.

Selain itu kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program CSR, seperti kondisi lahan, cuaca, serta partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui kendala pada aspek ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait.

Informan Q1 selaku HRD PT Agrikencana Perkasa menyatakan bahwa:

"Perusahaan sudah berupaya melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program CSR. Namun, pada pelaksanaannya tidak semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif sehingga kerja sama dalam menjalankan program belum sepenuhnya optimal."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Q4 selaku petani yang menyatakan bahwa:

"Kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau panjang atau curah hujan yang tinggi, sering memengaruhi hasil panen meskipun petani telah menerima bantuan dari program CSR. Selain itu, kondisi lahan yang berbeda-beda juga memengaruhi keberhasilan budidaya pertanian."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, khususnya tingkat partisipasi masyarakat, masih memengaruhi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Agrikencana Perkasa. Tidak seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan CSR tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan perusahaan sebagai pelaksana program, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kebutuhan, kesibukan dalam kegiatan pertanian, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program CSR. Kondisi tersebut

menyebabkan manfaat program belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran sehingga efektivitas pelaksanaan CSR masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Selain faktor sosial, kondisi lingkungan juga berkaitan dengan dinamika yang berkembang di sekitar wilayah operasional perusahaan. Perubahan kondisi pertanian, cuaca, maupun karakteristik masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan program sehingga perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bentuk kegiatan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, aspek *Environment* menunjukkan bahwa keberhasilan CSR merupakan hasil interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan program CSR yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi petani lokal.

Berdasarkan teori intervensi sosial dari Ife (2013), faktor lingkungan (*environment*) yang meliputi kondisi sosial, budaya, dan iklim memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kondisi cuaca dan tingkat partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor penghambat apabila tidak mendukung pelaksanaan program. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lu (2020) serta Hidayah dkk. (2025) yang menyatakan bahwa perubahan kondisi alam

dan rendahnya partisipasi masyarakat merupakan tantangan eksternal dalam pelaksanaan program sosial.


Berdasarkan hasil wawancara, kendala pada faktor lingkungan dalam pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, karakteristik lahan pertanian yang beragam, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam mendukung keberlanjutan program. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program CSR di lapangan.

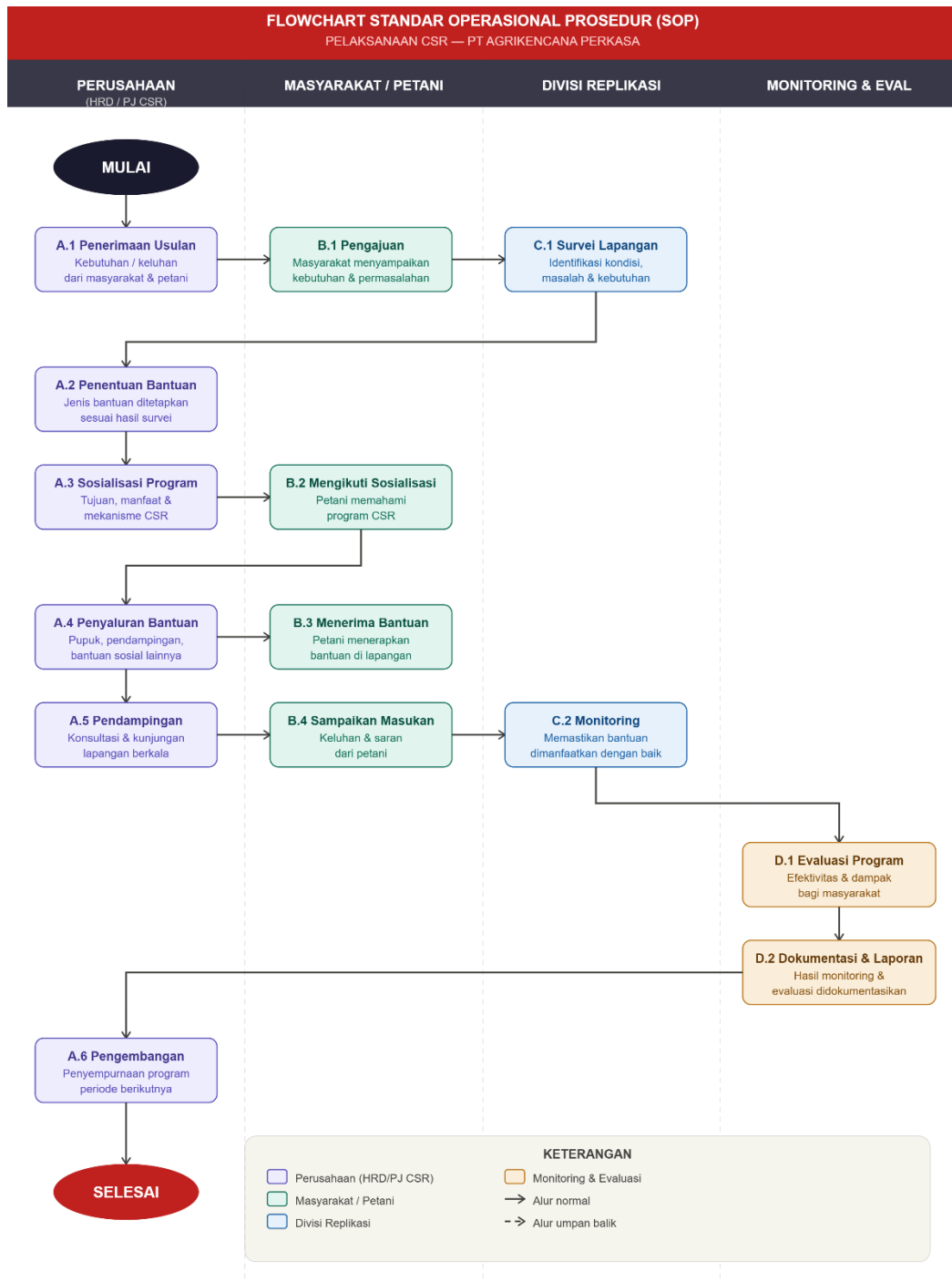
Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa pada petani lokal di Desa Ceper meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengelola CSR (*man*), belum adanya alokasi anggaran yang tetap (*money*), keterbatasan dan ketidaksesuaian bantuan yang diberikan (*material*), belum tersedianya SOP tertulis serta monitoring dan evaluasi yang terjadwal (*method*), kurang optimalnya pemanfaatan media informasi dan teknologi publikasi (*machine*), serta kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung (*environment*). Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program CSR sehingga diperlukan perbaikan secara menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan program.

4.4 Output Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa

Hasil penelitian, diketahui kalau pelaksanaan program CSR PT Agrikencana Perkasa telah memberi manfaat yang positif bagi masyarakat, khususnya petani lokal. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang secara khusus mengatur pelaksanaan program CSR serta sistem penyebaran informasi program yang masih belum terstruktur secara optimal. Sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan program CSR yang telah berjalan, peneliti menyusun rancangan SOP Pelaksanaan CSR perusahaan. SOP ini diharapkan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan program CSR secara lebih terarah, sistematis, transparan, & berkelanjutan. Selain itu, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Penelitian ini, diharapkan agar perusahaan senantiasa konsisten dalam menjalankan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat serta terus memberikan manfaat yang nyata bagi petani & lingkungan sekitar di masa mendatang. Dengan demikian, program CSR yang dijalankan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang semakin luas bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun *output* rancangan SOP Pelaksanaan CSR PT Agrikencana Perkasa sebagai berikut.:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	PELAKSANAAN	No. Dokumen :
		Revisi :
		Halaman : 1
CSR		
<p>1. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan pelaksanaan program CSR berjalan secara terencana, terarah, dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat, khususnya petani lokal. b. Meningkatkan transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan program CSR perusahaan. c. Menjadi pedoman kerja bagi pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program CSR. d. Memperluas penyebaran informasi program CSR agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara merata. <p>2. Ruang Lingkup</p> <p>Pelaksanaan CSR meliputi perencanaan, sosialisasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi program.</p> <p>3. Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> a. HRD/Penanggung Jawab CSR: Mengelola dan mengawasi pelaksanaan CSR. b. Divisi Replikasi: Membantu pelaksanaan dan pendampingan program. c. Penerima Manfaat: Mengikuti program dan memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan. d. Manajemen Perusahaan: Memberikan persetujuan dan pengawasan program. <p>4. Prosedur Pelaksanaan CSR</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan menerima usulan, kebutuhan, atau keluhan dari masyarakat dan petani. b. Tim CSR melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat. c. Perusahaan melakukan sosialisasi program CSR kepada masyarakat. d. Bantuan diberikan sesuai kebutuhan, seperti pupuk cair, pupuk kompos, pendampingan pertanian, maupun program sosial lainnya. e. Perusahaan melakukan pendampingan dan konsultasi kepada penerima manfaat secara berkala. f. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program serta dampaknya terhadap masyarakat. g. Hasil kegiatan dan evaluasi disusun dalam laporan CSR sebagai bahan perbaikan program di masa mendatang. <p>5. Dokumen Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir penerima manfaat. b. Dokumentasi kegiatan CSR. c. Laporan monitoring dan evaluasi CSR. <p>6. Indikator Keberhasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan diterima oleh penerima manfaat yang tepat sasaran. b. Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani penerima manfaat. c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program CSR. d. Tersusunnya laporan pelaksanaan CSR secara berkala e. Terciptanya hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. 		



Berikut adalah penjelasan mengenai alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Agrikencana Perkasa. Berdasarkan SOP yang telah disusun, pelaksanaan program CSR melibatkan pihak perusahaan, masyarakat, dan petani penerima manfaat. Proses pelaksanaan CSR terbagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

1. Proses dimulai dengan penerimaan usulan, kebutuhan, maupun keluhan dari masyarakat dan petani yang membutuhkan bantuan.
2. HRD atau penanggung jawab CSR bersama Divisi Replikasi melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat.
3. Hasil survei digunakan sebagai dasar dalam menentukan jenis bantuan yang akan diberikan agar tepat sasaran.

B. Sosialisasi dan Penyaluran Bantuan

1. Setelah kebutuhan masyarakat teridentifikasi, perusahaan melakukan sosialisasi mengenai program CSR kepada masyarakat dan kelompok tani.
2. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program CSR.
3. Bantuan kemudian disalurkan sesuai kebutuhan penerima manfaat, seperti pupuk cair, pupuk kompos, pendampingan pertanian, maupun bentuk bantuan sosial lainnya.

C. Pendampingan dan Monitoring

1. Setelah bantuan diberikan, perusahaan melakukan pendampingan kepada penerima manfaat melalui konsultasi dan kunjungan lapangan secara berkala.
2. Masyarakat dan petani dapat menyampaikan masukan maupun keluhan terkait pelaksanaan program CSR.
3. Perusahaan melakukan monitoring untuk memastikan bantuan dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi penerima program.

D. Evaluasi dan Pelaporan

1. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program CSR dan dampaknya bagi masyarakat.
2. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan dalam laporan pelaksanaan CSR.
3. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program CSR pada periode berikutnya agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Rekomendasi SOP Pelaksanaan CSR ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PT Agrikencana Perkasa belum memiliki SOP tertulis yang secara khusus mengatur pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selama ini, program CSR telah berjalan dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, khususnya petani lokal, namun pelaksanaannya masih belum memiliki pedoman tertulis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan kegiatan. Selain itu, penyebaran informasi

mengenai program CSR juga masih dilakukan secara sederhana sehingga belum seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat mengetahui dan mengakses program tersebut.

Maka dari itu, SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan program CSR secara lebih terstruktur, transparan, konsisten, dan tepat sasaran. Adanya SOP ini juga diharapkan dapat memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, penyaluran bantuan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi program. Dengan demikian, pelaksanaan CSR dapat berjalan lebih efektif, terdokumentasi dengan baik, serta mudah dievaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang.